BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TANJUNGBALAI
Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Link VII. Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361
Hp. 08116500533, Telp (0623) 7597527 Email : bpom_tanjungbalai@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANJUNGBALAI

NOMOR HK.02.02.20B.12.25.1082 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANJUNGBALAI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Tanjungbalai tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI TANJUNGBALAI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Tanjungbalai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai POM di Tanjungbalai memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tanjungbalai untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai POM di Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Balai POM di Tanjungbalai dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Tanjungbalai.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal: 5 Desember 2025
Kepala Balai POM di Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI TANJUNGBALAI
NOMOR HK.02.02.20B.12.25.1082
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANJUNGBALAI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Tanjungbalai sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu adanya rencana langkah strategis agar sistem pengawasan bisa berjalan dengan optimal.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tanjungbalai untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Balai POM di Tanjungbalai sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tanjungbalai ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan fungs sebagai berikut.

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-udangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Obat dan Makanan.

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada badan.

Balai POM di Tanjungbalai merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dipimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi II dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada dua pejabat struktur di lingkungan Balai POM di Tanjungbalai yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai POM di Tanjungbalai) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional.

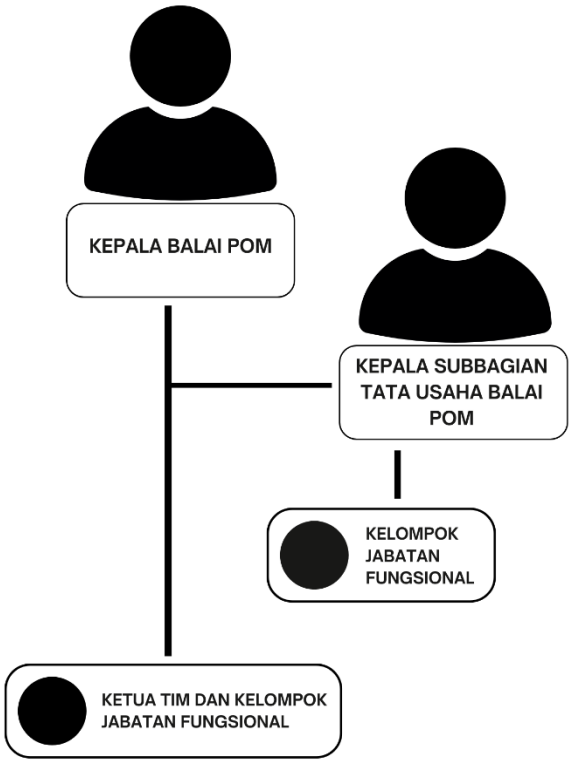

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Balai POM di

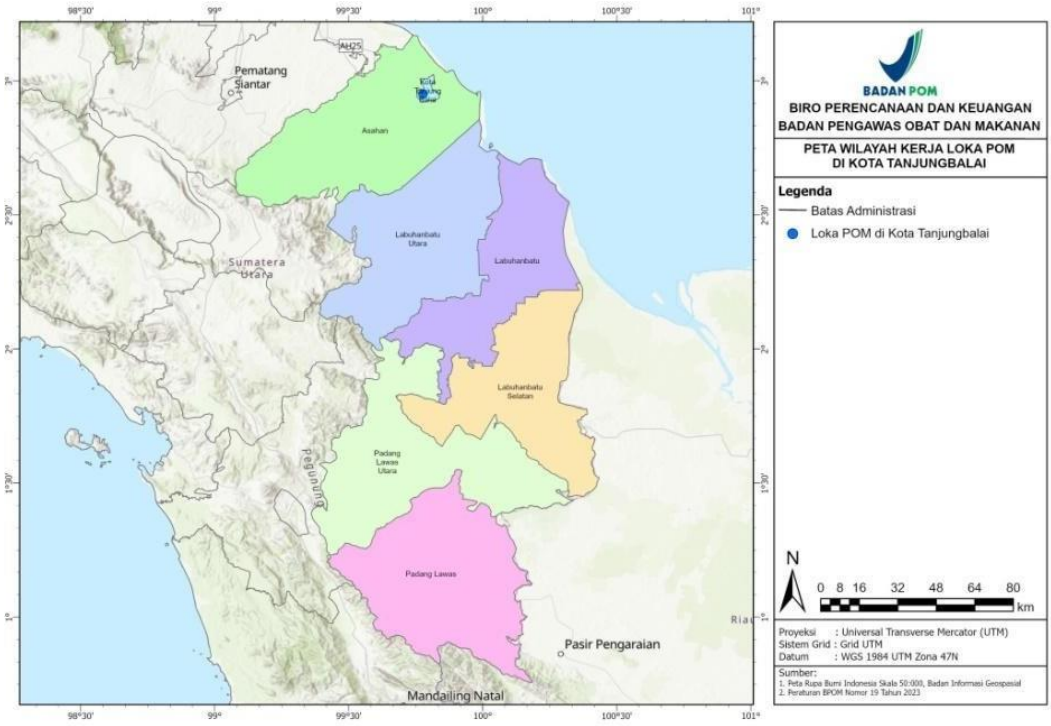

Gambar 1. 2Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai

Tanjungbalai terdiri dari Kota Tanjungbalai, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara.

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai

No.	Area	Luas (Km2)
1	Kota Tanjungbalai	107,8
2	Kabupaten Asahan	3.733,97
3	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3.571
4	Kabupaten Labuhanbatu	9.223,18
5	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3.596
6	Kabupaten Padang Lawas	3.892,74
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	3.918,05
Total		28042,74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jumlah kecamatan di wilayah kerja Pengawasan Balai POM di Tanjungbalai secara keseluruhan adalah 82 kecamatan dan 1169 Desa.

Tabel 1. 2 Wilayah Kerja kecamatan Pengawasan Balai POM di Tanjungbalai

No.	Area	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kota Tanjungbalai	6	31
2	Kabupaten Asahan	25	204
3	Kabupaten Labuhanbatu Utara	8	90
4	Kabupaten Labuhanbatu	9	98
5	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5	54
6	Kabupaten Padang Lawas	17	304
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	12	388
Total		82	1169

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2020-2024

Pada tahun 2025 terdapat perubahan nama UPT dari Balai POM di Tanjungbalai menjadi Balai POM diTanjungbalai. Hal ini dikarenakan adanya penambahan wilayah kerja. Adapun capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1. 3 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Tanjungbalai

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Ralisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKK 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	94,16	116,53	93	80,23	86,27	93,5	98,95	105,83	94	95,83	101,95	95,9	98,27	102,47
IKK 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	84,62	108,49	84,5	79,38	93,94	86,5	93,81	108,45	88,5	93,88	106,08	93,9	92,86	98,89
IKK 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	82,35	93,58	88	87,88	99,86	89	93,67	105,25	90	94,38	104,87	94,4	97,33	103,10
IKK 4 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	34,78	57,97	60	3,45	5,75	63	90	142,86	67	80	119,40	85	95,65	112,53
IKK 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat										89	94,74	106,45	94	93,94	99,94
SK 2 Meningkatnya efektifivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKK 1 Persentase	85	86,18	101,39	86	58,9	68,49	87	97	111,49	89	100	112,36	100	100	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan															
IKK 2 Persentase keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	38,5	38,68	100,47	48	26,09	54,35	57	21	36,84	66	38	57,58	40	46,44	116,10
IKK 3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100	100	100,00	100	100	100,00	100	120	120,00	100	100	100,00
IKK 4 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	72	34,29	47,63	50	43,33	86,66	55	32,26	58,65	60	35,71	59,52	40	53,57	133,93
IKK 5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan	70	30,77	43,96	40,5	48,59	119,98	41,5	38,46	92,67	42,5	48,43	113,95	48,3	49,38	102,24
IKK 6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77	100	129,87	79	100	126,58	90	100	111,11
IKK 7 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi Maanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DI Provinsi/Kabupaten/Kota													95	94,43	99,40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKK 1 Tingkat efektitias KIE Obat dan Makanan	89,21	92,88	104,11	90,1	93,75	104,05	91	93,91	103,20	91,9	94,7	103,05	95,6	96,39	100,83
SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKK 1 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	50	111,11	50	50	100,00	50	50	100,00	50	60	120,00	50	50	100,00
IKK 2 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,5	50	120,48	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	60	50	83,33
SK 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKK 1 Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	55	91,67	83	100	120,48	85	-		87	55	63,22	65	71,88	110,58
SK 6 Menguatnya laboratorium, Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKK 1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal							2,25	2	88,89	2,5	3	120,00	3	3	100,00
SK 7 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan															
IKK 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik UPT													89,75	92,08	102,60
SK 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang Optimal															
IKK 1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100,00	100	100		100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
IKK 2 Nilai AKIP										82,2	70,52	85,79	74,29	74,29	100,00
IKK 3 Nilai Pengelolaan Kearsipan													65,61	75,96	115,78
IKK 4 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)	95,83	100	104,35	95,83	100	104,35	100		0,00						
IKK 5 Persentase dokumen perjajnjian kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020 - 2022)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKK 1 Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	82,69	110,25	83	86,15	103,80	84	86	102,38	85	90,62	106,61	91,25	86,67	94,98
SK 10 Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel															
IKK 1 Nilai Kinerja Anggaran UPT							90,6	80,61	88,97	91,8	89,67	97,68	90,62	95,12	104,97
IKK 2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													100	100	100,00
IKK 3 Nilai Pengelolaan Barang Miliki Negara													82	92,62	112,95
IKK 4 Presentase Realisasai Penggunaan Produk dalam Negri													60	84,76	141,27
IKK 5 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT	93,5	75	80,21	93,5	75	80,21									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jika dilihat perkembangannya selama tiga tahun terakhir, nilai kinerja Balai POM di Tanjungbalai periode 2022 hingga 2024 bergerak secara konsisten terjadi peningkatan setiap tahunnya. Balai POM di tanjungbalai selalu berupaya untuk mempertahankan capaian kinerjanya. Nilai Kinerja Balai POM di Tanjungbalai dapat dilihat pada gambar berikutnya :

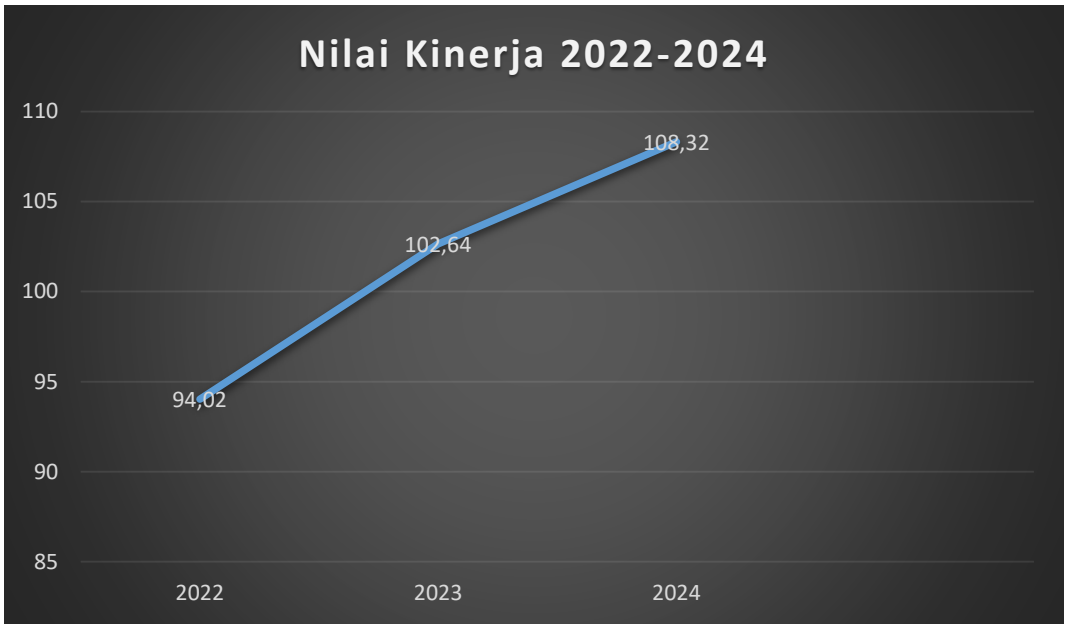

Gambar 1. 3 Tren realisasi Capaian Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2022-2024

Berdasarkan gafik Nilai Kinerja Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2022-2024, terlihat adanya peningkatan capain kinerja selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, Capaian kinerja hanya mencapai angka 94,02% dengan krtieria “Belum Memenuhi Ekspektasi" menandakan adanya beberapa IKU yang belum mencapai target. Pada tahun 2023 terjadinya peningkatan dengan nilai capaian 102,64% dengan kriteria istimewa menunjukan bahwa sebagian besar target telah terlampaui dan pada tahun 2024 capaian kinerja juga menunjukan hasil positif dengan peningkatan capaian menjadi 108,32% dengan kriteria istimewa ini juga membuktikan bahwa sebagian besar target yang ada di Balai POM di Tanjungbalai sudah terlampaui.

Selama tahun 2020-2024 Balai POM di Tanjungbalai memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 29 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjelasan lebih terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Sasaran Kegiatan 1, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing kerja UPT. Balai POM di tanjungbalai mengalami penurunan capaian dalam 4 tahun terakhirnya yaitu 94,14% (sembilan puluh empat koma empat belas persen) pada tahun 2020 d tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 71,46% (Tujuh puluh satu koma empat puluh enam persen), di tahun 2022 menunjukan perubahan dengan peningkatan menjadi 115,60% (Seratuh lima belas koma enam puluh persen), pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan tapi masi masuk ke dalam kategori sangat baik yaitu 107,75% (Seratus tujuh koma tujuh puluh lima persen) pada tahun 2023 dan 103,39% (Seratus tiga koma tiga puluh sembilan persen) pada tahun 2024.



Gambar 1. 4 Tren Realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 semakin meningkat. Realisasi tahun 2024 yaitu 98.27% dengan persentase capaian 102.47% dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah sampel obat yang disampling secara targeted Memenuhi persyaratan (MS). Kondisi ini terjadi karena metode sampling targeted yang digunakan dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 5 Tren Realiasi Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai berfluktuasi dimana pada tahun 2023 sebesar 93.88%. Realisasi tahun 2024 yaitu 92,86% dengan capaian kinerja 92,86% dengan kriteria "tidak tercapai/melampaui". Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang disampling secara acak yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TMK label/penandaan) maupun TMS hasil pengujian.



Gambar 1. 6 Tren Realisasi Indikator Persentase Obat Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan dari tahun 2020-2024 semakin meningkat. Realisasi tahun 2024 sebesar 96,67% dengan capaian kinerja yaitu 102,40% dengan kriteria “tercapai/melampaui”.



Gambar 1. 7 Tren Realisas Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2024 yaitu 95.65%, dengan capaian sebesar 112,53% dengan kriteria “tercapai/melampaui”



Gambar 1. 8 Tren Realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat ditargetkan 94% dengan realisasi 93,94% sehingga memperoleh capaian kinerja 99,94% dengan kriteria "tidak tercapai/melampaui". Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan masih rendah, juga sarana sudah melakukan pengelolaan makanan yang belum baik terutama dari segi penyimpaannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tidak terjaga kualitasnya.

2. Sasaran Kegiatan kedua, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT. Menunjuka tren positif dari tahun 2020-2024 dengan peningkatan capaian pada setiap tahunnya yaitu 82,22 (Delapan puluh dua koma dua puluh dua) pada tahun 2020. Tahun 2021 menjadi 85,90 (Delapan puluh lima koma sembilan puluh). Pada tahun 2022 menjadi 88,26 (Delapan puluh delapan koma dua puluh enam), pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai angka 98,33 (Sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga), dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan signigikan menjadi 110,56 (Seratus sepuluh koma lima puluh enam).



Gambar 1. 9 Tren Realiasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi dari Hasil Inspeksi Sarana Produk dan Distribusi yang Dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2022-2023 mengalami kenaikan. Sementara capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2024% capaian kinerja 100% dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen petugas dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.



Gambar 1. 10 Tren Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi dari Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan. Sementara capaian dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2024 % capaian kinerja 116,10% dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Keberhasilan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha terutama sarana pelayanan kefarmasian dalam menyelesaikan perbaikan (CAPA) ketidaksesuaian hasil inspeksi sarana. Selain itu petugas juga aktif untuk memonitoring progress CAPA dari pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 11 Tren Realisasi Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Indikator kinerja ini dari tahun 2020-2024 sudah memenuhi target, pada tahun 2023 realisasi capaian sebesar 120% karena banyaknya pelaku usaha yang mendaftarkan izin edar ke BPOM. Keberhasilan ini disebabkan sejak tahun 2022 Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan. Pada tahun 2024, capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria “tercapai/melampaui”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 12 Tren Realisasi Indikator Persentase Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Capaian pada indikator ini mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 53,57% dengan capaian kinerja yaitu 133,93% dengan kriteria "tercapai/melampaui". Hal ini disebabkan karena jumlah sarana produksi pangan (produksi pangan MD maupun pangan PIRT) yang memenuhi ketentuan sudah mengalami kenaikan pada tahun 2024.



Gambar 1. 13 Tren Realiasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Memenuhi Ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020-2024 berfluktuasi. Realisasi tahun 2024 sebesar 49,38% dengan capaian kinerja yaitu 102,23% dengan kriteria “tercapai/melampaui”.

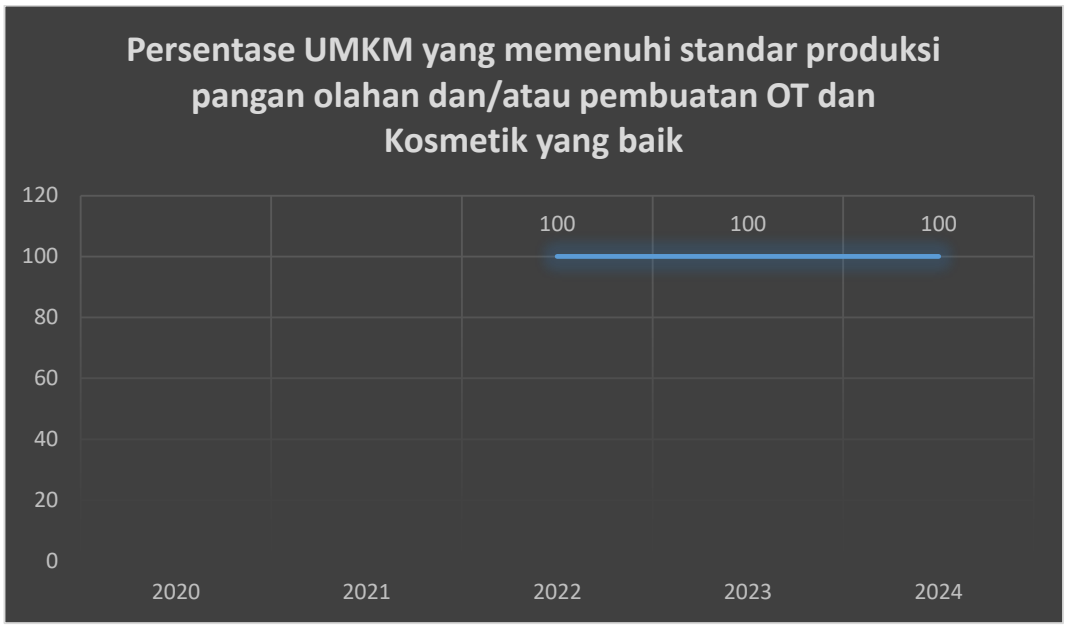

Gambar 1. 14 Tren Realisasi Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian kinerja yaitu 111,11% dengan kriteria “tercapai/melampaui”. Hal ini disebabkan karena meningkatnya komitmen dari pelaku usaha UMKM dalam memenerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta komitmen dalam menyelesaikan pesyaratan registrasi pangan olahan. Selain itu Balai POM di Tanjungbalai juga rutin mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB serta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dari tahap awal sampai ke persetujuan izin edar produk.

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan provinsi/kabupaten/kota. Indikator Kinerja ini baru dilaksanakan di tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 94,43% dengan capaian kinerja yaitu 99,40% dengan kriteria “belum tercapai/melampaui”. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- SK Tim TKKPOM di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai masih 3 SK dari total 7 wilayah kerja. Pelaksanaan TKPPOM masih menjadi kendala pada SK TIM POM di 4 kabupaten di wilayah kerja UPT. Sudah dilakukan follow up ke lintas sektor yang bersangkutan, tetapi ada sebagian masih menunggu pengesahan di Bupati, yang sebagian lainnya belum ada koordinasi/ rapat linsek untuk pembentukan Tim TKKPOM.
- Pelaksanaan TPPS juga masih menjadi kendala, karena tidak semua kabupaten aktif menyelnggarakan kegiatan program stunting yang mengundang UPT
- Kelengkapan data dukung belum sesuai yang diminta

Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota dipengaruhi oleh:

- Koordinasi bersama lintas sektor di 7 wilayah kerja kota/kabupaten Balai POM di Tanjungbalai .
- Komitmen dari seluruh bidang baik informasi dan komunikasi, Pemeriksaan dan penindakan untuk selalu bersinergis dengan lima pentahelix yang mendukung program pengawasan obat dan makan didaerah.

3. Sasaran kegiatan ketiga. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Mengalami capaian realisasi positif di setiap tahunnya. Yaitu 104,11% (Seratus empat koma sebelas persen) pada tahun 2020. Tahun 2021 mendapatkan capaian realisasi yang sama dari tahun sebelumnya 104,05% (Seratus empat koma lima persen). Tahun 2022 memiliki capaian realisasi 103,20% (Seratus tiga koma dua puluh persen) dan tahun 2023 mendapatkan capaian yang sama 103,5% (Seratus tiga koma lima persen). Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi masi masuk ke dalam kategori istimewa 100,83% (Seratus koma delapan puluh tiga persen).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 15 Tren Realisasi Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Capaian strategis ketiga yaitu efektivitas KIE Obat dan Makanan; Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2024 yaitu 96,39, apaian kinerja sebesar 100,83% dengan kriteria Sangat Efektivitas Sekali. Berbagai kegiatan KIE yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai, seperti Penyebaran Informasi pada Pameran HUT Kab. Asahan dan Hari Jadi Kota Tanjungbalai, Penyebaran Informasi kepada Kelompok Rentan Stunting di Kab. Padang Lawas dan Kota Tanjungbalai, Sosialisasi terkait obat dan makanan kepada Anggota Pramuka, Sosialisasi kepada Penanggungjawab Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar) di Kota Tanjungbalai, Sosialisasi terkait Kosmetik Aman pada Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran dan aktif pada kegiatan Layanan konsultasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Sasaran kegiatan keempat, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Dapat dikategori stabil dalam empat tahun belakangan yaitu 115,80% (Seratus lima belas koma delapan puluh persen) pada tahun 2020. Mengalami penurunan menjadi 100,00% (Seratus persen) pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mendapatkan realisasi yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Seratus persen). Tahun 2023 meningkat menjadi 110,00% (Seratus sepuluh persen) dan pada tahun 2024 mengalami penurunan 91,67% (Sembilan satu koma enam puluh tujuh persen).

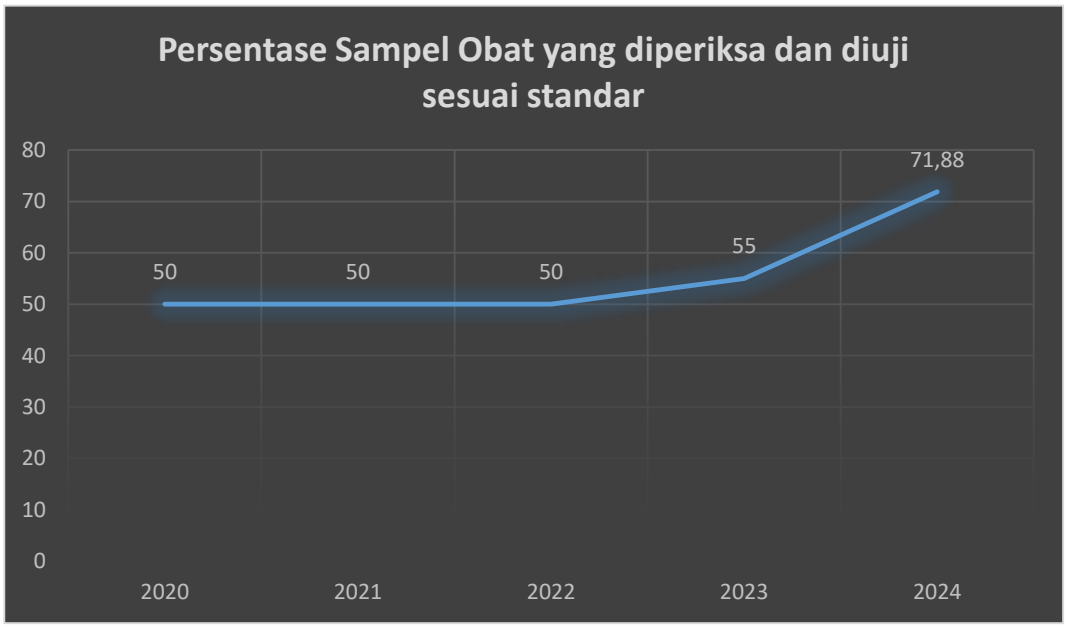

Gambar 1. 16 Tren Realisasi Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar Realisasi tahun 2024 yaitu 50%, capaian kinrja sebesar 100% dengan kriteria "tercapai/melampaui".

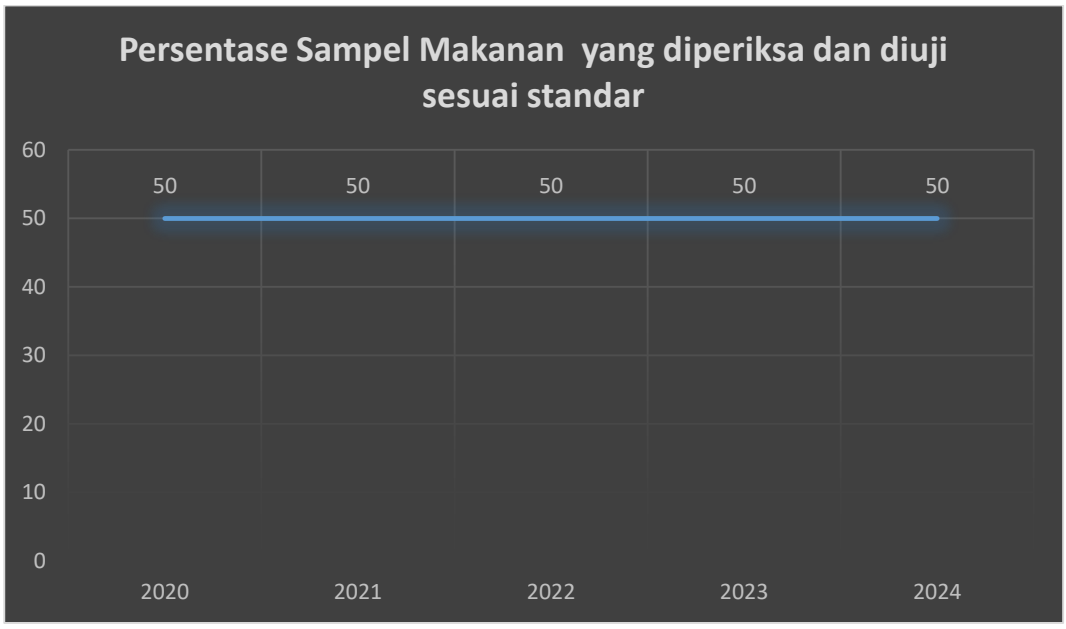

Gambar 1. 17 Tren Realisasi Indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Realisasi tahun 2024 yaitu 50,51%, capaian kinerja sebesar 101,01% dengan kriteria "tercapai/melampaui"

5. Sasaran kegiatan kelima, Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Menunjukan tren positif dalam empat tahun belakangan yaitu 91,67% (Sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2020, Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 120,48 (Seratus dua puluh koma empat puluh delapan persen), pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 63,22% (Enam puluh tiga koma dua puluh dua persen). Pada tahun 2024 kembali menunjukan tren positifnya dengan peningkatan menjadi 110,58% (Seratus sepuluh koma lima puluh delapan persen).



Gambar 1. 18 Tren Realsasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanakan

Capaian kegiatan yang kelima yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan; Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan dari tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 71,88% dengan capaian yaitu 110,58%. Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan meskipun kompetensi SDM masih belum memadai karena belum pernah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengikuti diklat intelijen dasar maupun analis data. Balai POM Kota Tanjungbalai sudah memiliki 2 orang PPNS namun belum memiliki pengalaman dalam hal pemberkasan sehingga dalam menangani proses pemberkasan perkara masih membutuhkan bantuan penyidik dari loka POM di Kabupaten Toba.

6. Sasaran kegiatan keenam, Menguatnya laboratorium, Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Menunjukan peningkatan dalam tiga tahun belakangan. Pada tahun 2022 realisasi capaian 88,89% (Delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen). Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 120,00% (Seratus dua puluh persen). Dan pada tahun 2024 capaian realisasi 100,00 (Seratus persen).

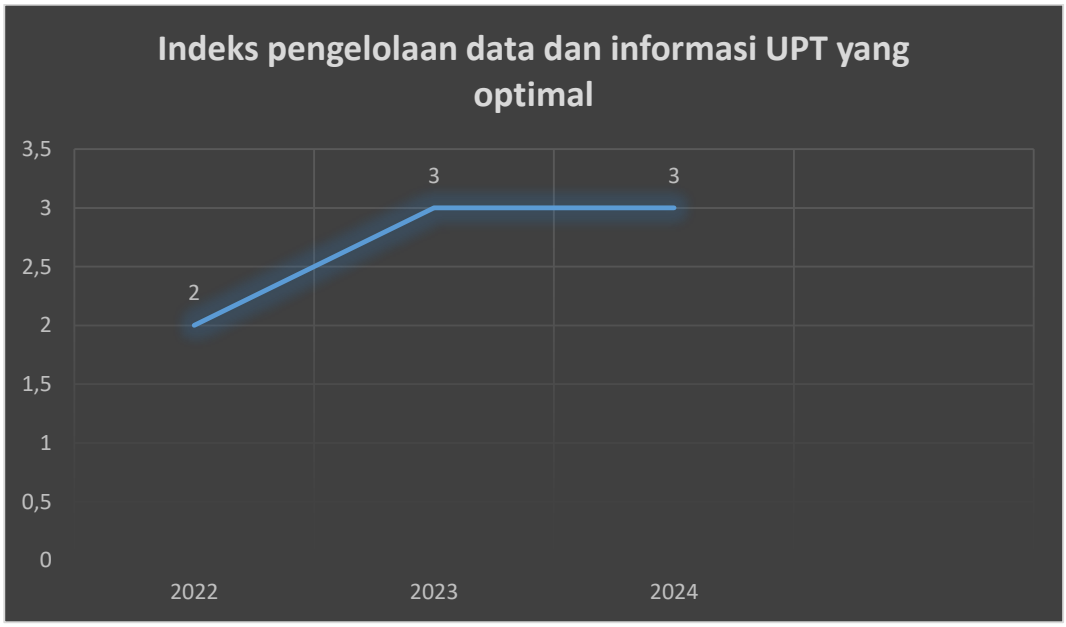

Gambar 1. 19 Tren Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

7. Sasaran kegiatan ketujuh, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan menujukan tren yang positif pada tahun 204 yaitu 102,60% (Seratus dua koma enam puluh persen) dengan kategori sangat baik.
8. Sasaran kegiatan kedelapan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase implementasi rencana aksi RB dari tahun 2020-2024 sudah mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2024 yaitu 100% dengan kriteria "tercapai/melampaui". Keberhasilan ini dapt dicapai karena target yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik oleh setiap petugas. Selain itu, penetepan rencana aksi RB didalam SKP pegawai menjadi faktor yang sangat penting dalam pencapaian target dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini dikareranakan, setiap pegawai Balai POM di Kota Tanjungbalai merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk dapat menyelesaikan program RB pada SKP masing-masing pegawai.

Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu. Realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan kriteria "tercapai/melampaui".

Nilai AKIP. Realisasi tahun 2024 yaitu 74,9%, capaian kinerja sebesar 100,82% dengan kriteria "tercapai/ melampaui".

Kearsipan. Realisasi tahun 2024 yaitu 75,96, capaian kinerja sebesar 115,78% dengan kriteria "tercapai/melampaui".

Capaian strategis ketujuh terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal; Indeks profesionalitas ASN ; Realisasi tahun 2024 yaitu 86,67% dengan kriteria Capaian strategis kedelapan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; Indeks pengelolaan data dan informasi dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2024 yaitu 3 dengan kriteria "tercapai". Hal ini dikarenakan telah dilakukannya monitoring secara konsisten terhadap Pegawai dan Pimpinan Balai POM di Kabupaten yang memanfaatkan Email dan Dashboard BOC sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing Capaian strategis kesembilan terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel; Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2022-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2023 capaian realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2024 yaitu 95,12%, capaian kinerja sebesar 104,97% dengan kriteria "tercapai/melampaui".

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Balai POM di Tanjungbalai menyadari pentingnya memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat. Dinamika lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh faktor global, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi menuntut BPOM untuk senantiasa adaptif. Oleh sebab itu, partisipasi dan aspirasi masyarakat menjadi komponen penting dalam proses perumusan kebijakan. Masukan masyarakat tidak hanya membantu BPOM dalam mengenali kebutuhan dan ekspektasi publik, tetapi juga memungkinkan lembaga ini untuk merespons perubahan secara lebih cepat, tepat, dan efektif.

Pengawasan terhadap obat dan makanan merupakan proses yang terus berkembang dan memerlukan inovasi berkelanjutan sejalan dengan kemajuan zaman. Dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan, BPOM dapat merancang strategi pengawasan yang lebih inklusif, adaptif, dan tanggap terhadap isu-isu kesehatan yang muncul, termasuk pengendalian peredaran obat, peningkatan keamanan pangan, serta pemastian ketersediaan produk kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pandangan dan aspirasi masyarakat juga membantu BPOM memahami bagaimana perkembangan teknologi digital dan perubahan demografi berpengaruh terhadap pola konsumsi obat dan makanan. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam penyesuaian kebijakan serta mekanisme pengawasan agar tetap relevan dan efektif.

Untuk itu, BPOM mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penjaringan aspirasi publik. Setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan berharga dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029. Kolaborasi antara BPOM dan masyarakat diharapkan mampu memastikan bahwa sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan, masyarakat memiliki peran strategis baik sebagai subjek maupun objek dalam pelaksanaan program pengawasan. Tujuan utama sistem pengawasan secara global adalah mewujudkan masyarakat yang sehat melalui konsumsi obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, masyarakat juga berperan sebagai konsumen yang cerdas agar terhindar dari produk yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat menjadi faktor penting yang diperhatikan BPOM dalam merancang program pengawasan obat dan makanan. Salah satu bentuk upaya BPOM dalam menghimpun masukan publik dilakukan melalui **Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**, serta **Indek Pelayanan Publik.** Indeks pelayanan publik di Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori sangat baik dengan nilai capaian 4.39/A.

Balai POM di Tanjungbalai menjaring feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKB). SKM dilakukan kepada beberapa respon sehingga mendapatkan saran yang harus diperbaiki yaitu :

1. Dalam unsur persyaratan perlunya peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait persyaratan pelayanan.
2. Dalam unsur sarana dan prasarana perlunya perbaikan tata ruang (*layout*) ruang layanan dan peningkatan fasilitas pelayanan.
3. Pada unsur waktu penyelesaian perlunya meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait dengan SlA dan *timeline* pelayanan.

Pada Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan standar pelayanan publik dari komponen masyarakat yang diwakiliki oleh akademisi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Perwakilan asosiasi pelaku usaha, lintas sektor/OPD, Media, Kelompok rentan dan masyarakat umum. Masukan dari FKP adalah pada sarana prasarana layanan yaitu tidak ada ruang ibu menyusui, seharusnya disediakan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan (ibu menyusui).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Renstra Balai POM di Tanjungbalai 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tanjungbalai sehingga menjadi landasan dalam proses penyusunan Renstra. Permasalahan yang muncul bukan hanya berfokus kepada permasalahan yang ada pada satuan kerja tetapi permasalahan nasional dan global yang harus segera dapat terselesaikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang memiliki mandat untuk menjamin keamanan, khasiat, serta mutu produk kesehatan dan pangan di indonesia. BPOM berada pada posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks serta memikul tanggung jawab besar dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat. Salah satu tantangan tersebut menculnya ancaman kesehatan baru (*emerging diseases)*, yang menuntut tingkat kesiapsiagaan dan responsivitas tinggi dari sistem pengawasan yang diterapkan.

Masa depan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adanya kemampuan beradaptasi serta inovasi yang tanggap terhadap perubahan global, potensi ancaman kesehatan baru, dan kemajuan teknologi. Melalui proses identifikasi terhadap potensi yang dapat dioptimalkan serta permasalahan yang perlu diselesaikan, Balai POM di Tanjungbalai dapat menyusun strategi yang tepat guna meningkatan kualitas pelayanan publik serta menjamin pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif dan bermutu. Renstra ini berperan sebagai pedoman bagi Balai POM di Tanjungbalai dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang, memperkuat sistem pengawasan, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap ketersediaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Dalam kurung waktu lima tahun mendatang (2025-2029), Balai POM di Tanjungbalai akan dihadapkan pada berbagai potensi dan permasalahan yang bersifat kompleks. Sebagai langkah strategis dalam menyusun arah perencanaan jangka menengah tersebut, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) menjadi pendekatan mendasar untuk memetakan potensi serta tantangan yang mungkin dihadapi Balai POM di Tanjungbalai pada periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat dilakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, sehingga



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diperoleh dasar yang kuat dalam merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi sekaligus mengatasi permasalahan dalam upaya menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (*Strenght*)

Analisis terhadap kondisi internal organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan Balai POM di Tanjungbalai yang memiliki peran penting dalam memahami serta mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan eunggulan dalam pelaksaaan fungsi pengawasan. Proses identifikasi kekuatan ini tidak hanya berperan dalam menjaga efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga mnejadi dasar penting dalam perencanaan pengembangan strategis gua memperkuat posisi Balai POM di Tanjungbalai di masa depan. Adapun kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tanjungbalai berikut ini merupakan aset utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya :

1. Pelayanan Publik yang sangat baik

Memiliki reputasi yang baik di masyarakat merupakan salah satu kekuatan penting yang dimiliki oleh Balai POM di Tanjungbalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Reputasi positif mencerminkan tinkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja, integritas, dan profesionalisme lembaga dalam memastikan keamanan, mutu, serta manfaat produk yang beredar di pasaran. Reputasi ini terbentuk melalui konsistensi Balai POM di Tanjungbalai dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 20 Hasil Kepuasan Masyarakat

Bukti konkret dari reputasi baik tersebut dapat dilihat melalui hasil survei kepuasaan masyarakat Balai POM di Tanjungbalai, yang menunjukan nilai indeks sebesar 94,5 dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian ini menggambarkan bahwa masyarakat menilai layanan BPOM terutama dalam aspek persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi, dan perilaku pelaksanaan telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan demikian, reputasi positif ini tidak hanya menjadi cerminan keberhasilan Balai POM di Tanjungbalai dalam memberikan pelayanan publik yang prima, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap peran strategis Balai POM di Tanjungbalai sebagai pelindung kesehatan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 21 Nilai Per Unsur Layanan

Memiliki unit pelayanan pengaduan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat merupakan salah satu kekuatan strategis Balai POM di Tanjungbalai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Unit ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan informasi, keluhan, maupun sarana terkait pengawasan obat dan makanan. Keberadaan layanan pengaduan yang responsif dan mudah diakses mencerminkan komitmen Balai POM di Tanjungbalai terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

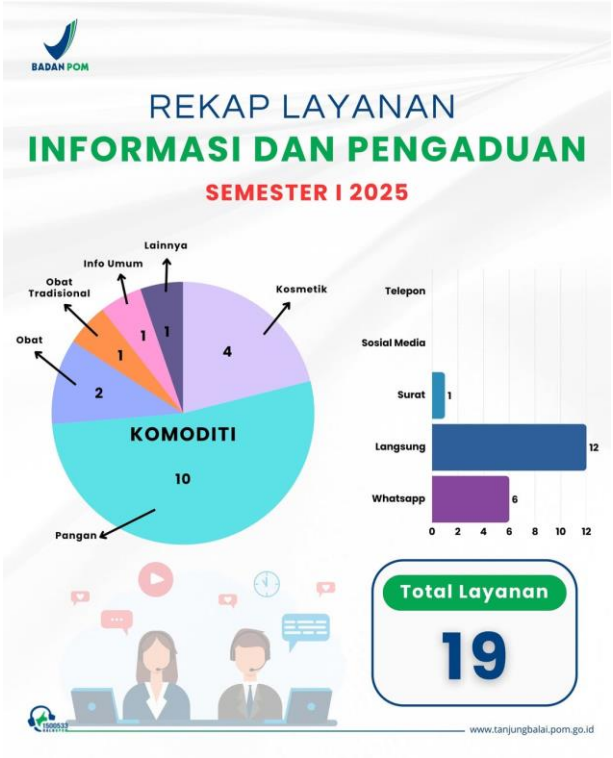

Gambar 1. 22 Rekap Layanan Informasi dan Pengaduan

Bukti konkret dari peran aktif unit ini dapat dilihat melalui dara Rekap Layanan Informasi dan Pengaduan Semester I Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan hasil tersebut, tercatat 19 layanan pengaduan yang diterima dengan berbagai saluran komunikasi, seperti layanan langsung (12), Whatsapp (6), dan surat (1). Komoditas yang paling banyak dilaporkan adalah kategori pangan (10 kasus), diikuti oleh kosmetik, obat, obat tradisonal, dan lainnya. Data ini menunjukan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap Balai POM di Tanjungbalai sebagai lembaga yang responsif dan terbuka terhadap masukan publik, sekaligus mempertegas peran BPOM dalam menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

2. **Pengolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel**

   Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tanjungbalai didukung oleh alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program dan sasaran strategis organisasi. Pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan dengan prinsip **efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas**, guna memastikan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Tanjungbalai senantiasa berupaya menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan berorientasi pada hasil (*result-oriented budgeting*). Alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas, seperti penguatan sistem pengawasan pre-market dan post-market, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan pelaku usaha, serta pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Selain itu, optimalisasi penggunaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan perencanaan yang matang, pengendalian yang ketat, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien tanpa mengurangi kualitas output dan capaian kinerja.

Kinerja pengelolaan anggaran Balai POM di Tanjungbalai juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas publik. Setiap kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipertanggungjawabkan secara transparan melalui mekanisme pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja yang terukur. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik serta pengawasan berjenjang menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan dukungan anggaran yang memadai serta tata kelola keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel, Balai POM di Tanjungbalai mampu menjalankan berbagai program strategis secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat peran Balai POM di Tanjungbalai sebagai pelaksana pengawasan obat dan makanan di daerah, serta dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM secara nasional menuju sistem pengawasan yang unggul, transparan, dan berintegritas.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Memiliki sinergitas yang kuat dengan lintas sektor terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**

Memiliki jaringan yang kuat dengan unit kerja di lingkungan Balai POM di Tanjungbalai maupun dengan berbagai kelembagaan lain merupakan salah satu kekuatan penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BPOM. Kolaborasi dan koordinasi lintas unit serta antarinstansi memungkinkan terwujudnya sinergi dalam pengawasan obat dan makanan, terutama dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Jaringan kerja yang solid juga berperan dlam mempercepat proses pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Melalui hubungan kelembagaan yang baik, baik secara internal dengan unit-unit teknis Balai POM di Tanjungbalai maupun eksternal dengan instansi pemerintah, lembaga akademik, dan sektor swasta, Balai POM di Tanjungbalai dapat memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan daya tanggap terhadap isu-isu kesehatan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan jaringan kerja yang kuat menjadi faktor strategis dalam mempercepat penyelesaian tugas dan memastikan efektiitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang berorientasi pada perlindungan konumen dan kesehatan publik.



Gambar 1. 23 Audensi Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Padang Lawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan audiensi sinergi pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Padang Lawas pada 15 Juli 2025. Kegiatan Audiensi di Kabupaten Padang Lawas Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, dan Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.

Adapun yang menjadi pokok bahasan yaitu pengelolaan DAK NF BPOM, Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pengawasan AMR, permintaan tindak lanjut pengawasan obat dan makanan oleh pemangku kepentingan, Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, serta rencana aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Padang Lawas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas menyambut baik audiensi dari Balai POM di Tanjungbalai dan mendorong Dinas Kesehatan agar segera menindaklanjutinya.

Audiensi ini diharapkan menjadi titik tolak kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Balai POM, dalam rangka menciptakan ekosistem konsumsi yang aman, sehat, dan berkualitas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Komitmen pemanfaatan teknologi dan inovasi

Balai POM di Tanjungbalai telah memiliki sistem manajemen informasi yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Sistem ini dikembangkan sebagai sarana untuk mengelola data dan informasi secara terpadu, akurat, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun perencanaan strategis. Keberadaan sistem manajemen informasi ini juga mencerminkan komitmen Balai POM di Tanjungbalai terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi informasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. 24 Website Balai POM di Tanjungbalai

Melalui sistem manajemen informasi tersebut, berbagai proses kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Data hasil pengawasan, pengujian laboratorium, kegiatan penyidikan, serta pembinaan pelaku usaha dan edukasi masyarakat dikelola secara sistematis untuk mendukung integrasi informasi antara unit teknis di lingkungan BPOM dan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat. Pemanfaatan sistem informasi ini juga memungkinkan peningkatan kecepatan dalam penyampaian laporan, pengawasan distribusi obat dan makanan, serta pemantauan capaian kinerja organisasi.



Gambar 1. 25 Google Sites E-Kinerja Balai POM di Tanjungbalai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, penerapan sistem manajemen informasi mendukung transformasi digital yang tengah diupayakan oleh BPOM secara nasional. Balai POM di Tanjungbalai terus berupaya memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital pegawai, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan database internal guna mempercepat proses pelayanan publik dan memperluas akses informasi kepada masyarakat. Dengan sistem manajemen informasi yang andal, diharapkan penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan dapat berlangsung lebih efektif, adaptif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, keberadaan sistem manajemen informasi menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pelaksanaan tugas Balai POM di Tanjungbalai. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan organisasi yang berbasis data, inovatif, serta responsif terhadap tantangan dan dinamika pengawasan obat dan makanan di era digital.

5. Kualitas SDM yang kompeten dan profesional dengan spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi

Seluruh pegawai Balai POM di Tanjungbalai merupakan satu angkatan penerimaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergolong muda dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Kondisi ini menjadi potensi strategis bagi organisasi dalam membangun sumber daya manusia yang energik, adaptif, dan progresif terhadap perubahan. Dengan latar belakang usia yang relatif muda, para pegawai memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, inovasi sistem kerja, serta kebijakan baru di bidang pengawasan obat dan makanan.

Semangat kerja yang tinggi yang dimiliki oleh para pegawai menjadi modal penting dalam memperkuat kinerja organisasi. Antusiasme dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari mencerminkan komitmen untuk memberikan kinerja terbaik, baik dalam pelayanan publik, pengawasan lapangan, maupun kegiatan administrasi dan dukungan teknis lainnya. Keberadaan sumber daya manusia yang masih muda ini juga menjadi peluang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

besar bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk mengembangkan budaya kerja yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka terhadap pembelajaran.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi yang terencana dan berkesinambungan, agar semangat dan energi positif yang dimiliki para pegawai dapat diarahkan secara tepat untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Melalui bimbingan teknis, pelatihan, serta penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme, Balai POM di Tanjungbalai berupaya membentuk pegawai yang tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Dengan demikian, keberadaan pegawai yang masih muda dan penuh semangat ini diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan organisasi yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, sejalan dengan arah kebijakan dan transformasi kelembagaan BPOM menuju pengawasan obat dan makanan yang lebih modern dan efektif.

6. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

Balai POM di Tanjungbalai sudah memiliki ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang berkembang secara konsisten, kuat, dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Ekosistem tersebut terbentuk melalui sinergi berbagai pihak, penerapan inovasi dalam edukasi, serta pelaksanaan program pendampingan yang menjangkau seluruh wilayah unit kerja Balai POM di Tanjungbalai.

Salah satu program yang dimiliki oleh balai POM di Tanjungbalai adalah simple si KHOKANG (Sistem Informasi Pelayanan Sertifikasi Kosmetik, Suplemen, Kesehatan, Obat Bahan Alam dan Pangan) dimana program ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif terkait registrasi produk obat dan makanan bagi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi usaha, serta tokoh masyarakat berkontribusi memperluas jangkauan edukasi risiko, literasi konsumsi aman, dan penguatan gerakan masyarakat sadar pangan aman. Pemberdayaan berbasis komunitas telah dilakukan pada komunitas sekolah, desa, dan pasar. Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas ini dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Ketiga program tersebut menunjukkan tren peningkatan intervensi setiap tahunnya.

1.2.2 Kelemahan (Weaknes)

Dalam menghadapi dinamika serta meningkatnya kompleksitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Tanjungbalai masih memiliki sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan pengatan. Beberapa area dalam pelaksanaan operasional menunjukan adanya kelemahan yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, proses identifikasi dan analisis terhadap kelemahan tersebut menjadi langkah strategis yang penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Upaya ini bertujuan agar BPOM dapat lebih optimal dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan. Berikut disajikan beberapa kelemahan (weaknes) Balai POM di Tanjungbalai yang perlu mendapatkan perhatian serta upaya perbaikan secara berkelanjutan.

1. **jumlah Penyidik Pegawai Negri Sipil/PPNS yang terbatas**

   Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai POM di Tanjungbalai saat ini masih terbatas, yakni hanya berjumlah tiga orang. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Keterbatasan jumlah PPNS berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas penyidikan, terutama dalam menangani kasus pelanggaran yang semakin kompleks, baik yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terjadi di wilayah pengawasan langsung maupun yang berkaitan dengan peredaran daring (online).

Sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum, PPNS memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Dengan jumlah personel yang masih terbatas, beban kerja menjadi cukup tinggi, terutama ketika harus melaksanakan kegiatan penyidikan, pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini berpotensi mempengaruhi kecepatan serta efektivitas penyelesaian kasus yang ditangani, sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan dukungan terhadap fungsi penyidikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Balai POM di Tanjungbalai berupaya melakukan optimalisasi peran PPNS yang ada melalui peningkatan kompetensi dan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi penegak hukum di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan dari BPOM pusat guna memperkuat kemampuan teknis dan hukum para penyidik. Selain itu, Balai POM di Tanjungbalai juga mendorong penambahan jumlah PPNS baru melalui usulan formasi kebutuhan pegawai agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah kerja.

Dengan adanya penguatan kapasitas dan penambahan jumlah penyidik di masa mendatang, diharapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di bidang obat dan makanan dapat terlaksana dengan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan komitmen Balai POM di Tanjungbalai untuk menjaga integritas, menjamin keamanan produk yang beredar, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat terhadap potensi pelanggaran di bidang obat dan makanan.



2. Sarana dan Prasarana yang masih terbatas sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan setiap fungsi secara optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterbatasan tersebut mencakup berbagai faktor pendukung, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun sistem pendukung teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dan menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan, terutama dalam hal cakupan wilayah, intensitas pengawasan, serta kecepatan tindak lanjut hasil temuan di lapangan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tanggung jawab strategis dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, Balai POM di Tanjungbalai dituntut untuk memiliki dukungan sarana, peralatan, dan sistem pengawasan yang memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan peralatan laboratorium dan sarana inspeksi lapangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan. Selain itu, kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas personel pengawas juga masih tinggi mengingat semakin kompleksnya jenis produk, saluran distribusi, serta pola pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Keterbatasan perkuatan pengawasan ini juga berpengaruh terhadap kemampuan UPT dalam mendukung program prioritas BPOM, seperti pengawasan berbasis risiko, deteksi dini pelanggaran, dan implementasi pengawasan terpadu lintas sektor. Dalam situasi demikian, Balai POM di Tanjungbalai berupaya untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dengan mengedepankan koordinasi, efisiensi sumber daya, serta sinergi dengan instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.

Sebagai langkah strategis, diperlukan upaya penguatan sarana dan sistem pendukung pengawasan, baik melalui peningkatan dukungan anggaran, pengadaan peralatan yang sesuai standar, pengembangan teknologi informasi, maupun peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market secara berkelanjutan, serta meningkatkan efektivitas Balai POM di Tanjungbalai dalam menjalankan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perannya sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan.

Dengan adanya penguatan dukungan pengawasan yang memadai, Balai POM di Tanjungbalai diharapkan mampu melaksanakan tugas secara lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, sejalan dengan arah kebijakan BPOM dalam mewujudkan sistem pengawasan yang adaptif, terintegrasi, dan berdaya saing global.

3. Keberadaan Balai POM di Tanjungbalai belum banyak diketahui oleh masyarakat

Keberadaan Balai POM di Tanjungbalai hingga saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat eksposur dan visibilitas lembaga di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman mengenai peran, fungsi, dan kontribusi Balai POM di Tanjungbalai dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap keberadaan Balai POM dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya kegiatan publikasi dan sosialisasi, belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi digital, serta masih kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam penyebarluasan informasi tentang tugas dan fungsi BPOM di daerah.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat strategi komunikasi publik yang lebih terarah dan efektif. Upaya peningkatan visibilitas lembaga perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti memperluas jangkauan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), membangun kemitraan dengan media massa dan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan edukasi langsung ke masyarakat — seperti penyuluhan, kampanye keamanan pangan, dan partisipasi dalam kegiatan daerah — dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan peran Balai POM secara lebih luas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan semakin dikenalnya Balai POM di Tanjungbalai, diharapkan masyarakat dapat memahami fungsi strategis lembaga ini sebagai pelindung kesehatan publik dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan peran Balai POM juga diharapkan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif, di mana masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaporkan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

4. Jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja Balai POM di Tanjungbalai

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Tanjungbalai	13	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Tanjungbalai	9	Struktural	1	1	0	100%
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	2	0	100%
4	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
5	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
6	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	8	5	3	62.5%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	13	11	2	84.62%
9	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
10	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	0	1	0%
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
13	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
14	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
17	Pengelola Layanan Operasional	6	Pelaksana	0	1	-1	100%
TOTAL				36	26	10	72.22%

Gambar 1. 26 Analisis Beban Kerja Balai POM di Tanjungbalai

Kompetensi dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai POM di Tanjungbalai saat ini belum sepenuhnya memadai apabila dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berdasarkan data kebutuhan jabatan (Analisis Beban Kerja/ABK), jumlah ideal pegawai di Balai POM di Tanjungbalai adalah **36 orang**, sementara jumlah pegawai yang tersedia saat ini hanya **26 orang**. Dengan demikian, terdapat **kekurangan tenaga sebanyak 10 orang**, atau tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai baru mencapai **72,22%**. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah sumber daya manusia yang tersedia dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kebutuhan riil organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara optimal.

Kekurangan pegawai ini terutama terlihat pada jabatan fungsional tertentu seperti **Arsiparis**, **Perencana Ahli Muda**, **Pranata Komputer**, dan **Pranata Keuangan APBN Terampil**, yang saat ini belum terisi atau masih di bawah kebutuhan ideal. Di sisi lain, jabatan **Pengawas Farmasi dan Makanan** yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan lapangan juga masih mengalami kekurangan tenaga, dengan tingkat pemenuhan sebesar **62,5% untuk jenjang Ahli Muda** dan **84,62% untuk jenjang Ahli Pertama**. Kekurangan ini berdampak pada tingginya beban kerja bagi pegawai yang ada, terutama dalam hal pelaksanaan inspeksi, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium, serta kegiatan edukasi dan penyidikan.

Selain aspek kuantitas, aspek kompetensi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian pegawai masih memerlukan peningkatan kapasitas dan pengembangan keahlian teknis agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan, perkembangan teknologi informasi, serta kompleksitas isu pengawasan di lapangan. Keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran kinerja, khususnya dalam pengawasan pre-market dan post-market yang membutuhkan ketelitian, kecepatan respon, serta kemampuan analisis yang tinggi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah strategis, antara lain dengan mengusulkan penambahan formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi ASN, serta mengoptimalkan distribusi dan pembagian tugas secara proporsional. Di samping itu, penerapan sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil dan penguatan kolaborasi antarbidang menjadi langkah penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas di tengah keterbatasan sumber daya manusia.

Dengan adanya upaya penguatan kompetensi dan pemenuhan jumlah ASN secara bertahap, diharapkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara profesional, responsif, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya mendukung arah kebijakan BPOM dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, berdaya saing, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Strategi yang dapat dimanfaatkan Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat efektivias serta memperluas jangkauan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Pemanfaatan peluang ini berperan penting dalam mendoro Balai POM di Tanjungbalai menjadi lembaga pengawas yang adaptif, proaktif, dan inovatif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan mengoptimalkan peluang yang ada, Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan kepercayaa publik, memperkuat tata kelola pengawasan, serta memastikan bahwa praktik pengawasan di indonesia. Berikut merupakan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat perannya dalam bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

1. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan

Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor dan pelaku usaha merupakan salah satu faktor strategis yang berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tanjungbalai. Sinergi yang terbangun antara Balai POM dengan instansi pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha di bidang obat dan makanan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pengawasan yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Tanjungbalai telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain melalui kegiatan koordinasi pengawasan bersama pemerintah daerah, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemitraan dengan pelaku usaha menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang sangat strategis, karena dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan sistem jaminan mutu serta keamanan produk secara mandiri. Melalui kerja sama yang konstruktif, pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga menjadi mitra dalam menjaga standar keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Selain itu, kerja sama lintas sektor juga memberikan manfaat signifikan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan berbasis risiko, serta penanganan isu-isu kesehatan yang membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi dengan dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga pendidikan turut memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan di tingkat daerah. Melalui mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bersama, efektivitas pengawasan dapat meningkat, sementara potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dapat diminimalkan. daerah. Melalui mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bersama, efektivitas pengawasan dapat meningkat, sementara potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dapat diminimalkan.



2. Peraturan yang semakin menguatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Perkembangan regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan dalam beberapa tahun terakhir memberikan dasar hukum yang semakin kuat bagi Balai POM di Tanjungbalai dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, Badan POM, maupun kementerian terkait telah mempertegas peran BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Penguatan regulasi tersebut tercermin melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang menjadi dasar pengaturan keamanan, mutu, dan gizi pangan; **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang menegaskan kembali peran BPOM dalam pengawasan obat dan makanan; serta **Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan**, yang memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dengan kewenangan operasional penuh. Selain itu, penerapan **Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM** memberikan landasan yang jelas bagi Balai POM di daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum.

Tidak hanya itu, berbagai **peraturan turunan dan pedoman teknis** seperti **Peraturan BPOM tentang Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko**, **Pedoman Pelaksanaan Farmakovigilans**, serta **Peraturan BPOM tentang Pengawasan Iklan dan Label Pangan Olahan** turut memperkuat mekanisme pengawasan pre-market dan post-market secara lebih komprehensif. Kehadiran regulasi-regulasi tersebut memungkinkan pelaksanaan pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta tantangan global dalam keamanan pangan dan obat.



Dengan dasar hukum yang semakin kuat, Balai POM di Tanjungbalai memiliki legitimasi dan arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya, baik di bidang pengawasan, penindakan, maupun pelayanan publik. Penguatan regulasi juga mendukung terciptanya koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengawasan terpadu di wilayah kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ke depan, Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha juga akan terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap ketentuan hukum dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, penguatan peraturan tidak hanya berfungsi sebagai landasan administratif, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, terpercaya, dan berintegritas demi perlindungan kesehatan masyarakat.

3. **Peningkatan kesadaran masyarakat terkait informasi sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Konsumen yang semakin peduli dan cerdas merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat produk yang dikonsumsi menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hal ini tercermin dari hasil kegiatan edukasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, pelajar, serta pelaku usaha di wilayah pengawasan.

   Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme **pre-test dan post-test**, menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata peserta dari **75,79 pada saat pre-test** menjadi **78,94 pada saat post-test**. Kegiatan ini diikuti secara lengkap oleh **19 orang peserta**, dan hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan tingkat pemahaman peserta setelah menerima materi edukasi yang diberikan. Kenaikan nilai tersebut mencerminkan efektivitas kegiatan penyuluhan dan KIE dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan pangan dan obat, serta mendorong perubahan perilaku menuju konsumen yang lebih bijak dan cerdas dalam memilih produk yang aman dikonsumsi. Peningkatan pengetahuan ini juga menggambarkan adanya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perkembangan positif dalam kesadaran masyarakat terhadap peran penting mereka sebagai konsumen yang berdaya.

Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan BPOM untuk membangun partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan serta memperkuat literasi keamanan pangan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya kepedulian dan kecerdasan konsumen, Balai POM di Tanjungbalai memperoleh dukungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Ke depan, upaya edukasi kepada masyarakat akan terus ditingkatkan melalui strategi KIE yang lebih interaktif, partisipatif, dan berbasis bukti, sehingga kesadaran masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap terwujudnya perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

4. **Peningkatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha.**

   Balai POM di Tanjungbalai secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat serta pelaku usaha melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat dan makanan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, sekaligus mendorong pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan KIE menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan dan kesehatan publik.

   Pelaksanaan kegiatan KIE oleh Balai POM di Tanjungbalai telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE tahun berjalan dengan tema *"Lawan Stunting dengan Pangan Aman dan Bergizi"* yang melibatkan 28 responden, diperoleh **Indeks Efektivitas KIE**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebesar 99,55, yang termasuk dalam kategori **"Sangat Efektif"**. Capaian ini mencerminkan bahwa kegiatan KIE yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap isu keamanan pangan dan gizi. Nilai tersebut juga menunjukkan kinerja optimal pada setiap indikator penilaian, yaitu: narasumber dan petugas KIE sebesar 100,00; konten atau informasi sebesar 100,00; pemahaman audiens sebesar 99,11; serta manfaat KIE sebesar 99,11.

Hasil yang sangat baik ini menjadi bukti nyata bahwa kegiatan KIE yang dilaksanakan Balai POM di Tanjungbalai telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kualitas materi yang disampaikan, kompetensi petugas, serta metode penyampaian yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ke depan, Balai POM di Tanjungbalai akan terus memperluas cakupan dan frekuensi kegiatan KIE, baik secara tatap muka maupun melalui media digital, agar pesan keamanan obat dan makanan dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran, termasuk pelaku usaha mikro dan masyarakat di wilayah terpencil.

Dengan demikian, peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kegiatan KIE tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi masyarakat di bidang obat dan makanan, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM dalam memperkuat pengawasan berbasis partisipasi publik. Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.



5. Peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan fungsi.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapabilitas sesuai dengan tuntutan perkembangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

zaman, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan yang disesuaikan dengan jabatan, peran, serta bidang tugas masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pegawai terhadap regulasi, standar, dan prosedur pengawasan obat dan makanan, sekaligus mengembangkan keterampilan teknis maupun manajerial yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek, baik teknis operasional seperti inspeksi, sampling, pengujian laboratorium, dan penilaian risiko, maupun aspek pendukung seperti pengelolaan data, komunikasi publik, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan setiap pegawai mampu meningkatkan kompetensi kerja secara berkelanjutan, menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan nasional, serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif dan efisien.

Selain itu, pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan diri, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan adanya upaya peningkatan kompetensi yang terencana dan berkesinambungan ini, diharapkan kinerja Balai POM di Tanjungbalai dapat semakin meningkat dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, serta memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan masyarakat.

1.2.4 Tantangan *(Threats)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor di liuar lingkungan Balai POM di Tanjunbalai dan menjadi sebuah tantangan yang harus dapat segera diselesaikan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, Sehingga Balai POM di Tanjungbalai dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan sesuai dalam penyelesainnya. Berikut yang menjadi komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Tanjungbalai dalam penyusunan Renstra selama lima tahun yang akan datang.

1. **Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki hasil temuan pengawasan.**

   Masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha dalam menindaklanjuti dan memperbaiki hasil temuan pengawasan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Balai POM di Tanjungbalai dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang obat dan makanan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan atau tidak melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap aspek yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

   Kurangnya kesadaran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari pelanggaran, lemahnya komitmen terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk, serta keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, persepsi bahwa pengawasan hanya bersifat administratif dan tidak berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha turut menyebabkan sebagian pelaku usaha belum menempatkan hasil pengawasan sebagai acuan penting dalam peningkatan kualitas produksi.

   Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Balai POM di Tanjungbalai karena tindak lanjut terhadap hasil pengawasan merupakan indikator penting dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan mutu dan keamanan produk. Apabila pelaku usaha tidak segera memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan, maka risiko terhadap kesehatan masyarakat dan kredibilitas produk di pasaran dapat meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai langkah konkret, Balai POM di Tanjungbalai terus melakukan pembinaan melalui kegiatan **Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**, **regulatory assistance**, serta **bimbingan teknis penerapan Cara Produksi yang Baik (Good Manufacturing Practice – GMP)** bagi pelaku usaha. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produk dan membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, mekanisme pengawasan juga diarahkan agar lebih partisipatif, dengan mendorong pelaku usaha berperan aktif dalam memastikan tindak lanjut atas temuan dilakukan secara cepat dan tepat.

Ke depan, Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha melalui pendekatan kolaboratif. Selain pendekatan edukatif, penerapan sanksi administratif dan hukum secara tegas juga tetap diperlukan terhadap pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan secara berulang. Dengan kombinasi pembinaan dan penegakan hukum yang seimbang, diharapkan kesadaran pelaku usaha akan meningkat, dan tingkat kepatuhan terhadap hasil pengawasan dapat terus membaik.

Melalui upaya berkelanjutan ini, Balai POM di Tanjungbalai bertekad untuk mewujudkan ekosistem usaha yang patuh regulasi, berintegritas, dan bertanggung jawab, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan masyarakat.



2. **Belum adanya efek jera pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang.**

   Masih terdapat pelaku usaha di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai yang melakukan pelanggaran berulang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Pelanggaran tersebut umumnya berkaitan dengan aspek keamanan, mutu, dan peredaran produk, seperti penggunaan bahan berbahaya pada pangan, tidak terpenuhinya standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

produksi yang baik, pelabelan yang tidak sesuai, serta peredaran produk tanpa izin edar atau yang telah kedaluwarsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi BPOM masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan yang lebih intensif dan konsisten.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran berulang bervariasi, antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan standar keamanan produk, keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan teknis dan administratif, serta motivasi ekonomi yang mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengabaikan ketentuan yang berlaku demi efisiensi biaya produksi. Selain itu, masih adanya pelaku usaha yang belum memahami risiko hukum dan dampak kesehatan dari pelanggaran tersebut turut memperparah permasalahan ini.

Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan berbagai langkah pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam beberapa kasus, efek jera belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan sumber daya pengawasan serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penegakan hukum di daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menekankan aspek penindakan tetapi juga memperkuat aspek pencegahan melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha dilakukan melalui kegiatan **Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**, bimbingan teknis penerapan **Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)**, serta **regulatory assistance** untuk membantu pelaku usaha memahami proses perizinan dan kewajiban pelaporan. Pendekatan persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku usaha dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi komitmen nyata untuk menjaga mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.

Ke depan, Balai POM di Tanjungbalai juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat penegak hukum, dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memperkuat efek jera bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran berulang. Langkah ini akan dibarengi dengan penerapan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa pengawasan difokuskan pada sektor dan pelaku usaha dengan tingkat risiko pelanggaran yang tinggi.

Dengan penerapan strategi pembinaan dan pengawasan yang seimbang antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum, diharapkan tingkat pelanggaran berulang oleh pelaku usaha dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat efektivitas pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya sistem pengawasan obat dan makanan yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada perlindungan kesehatan masyarakat.

3. Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai yang rawan terhadap jalur masuk tidak resmi sediaan farmasi dan pangan olahan

Era globalisasi dan perdagangan bebas membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Arus perdagangan yang semakin terbuka, baik di tingkat nasional maupun internasional, mendorong meningkatnya volume peredaran produk obat dan makanan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Kondisi ini menuntut Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat kapasitas pengawasan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana, agar dapat memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.



Sebagai wilayah pesisir yang memiliki potensi aktivitas perdagangan lintas daerah, Balai POM di Tanjungbalai menghadapi tantangan tersendiri dalam mengawasi keluar masuknya berbagai jenis produk, terutama pangan olahan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Produk-produk impor dan distribusi antarwilayah yang semakin beragam meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak terdaftar, tidak memenuhi standar, atau bahkan ilegal. Di sisi lain, perkembangan ini juga memberikan peluang bagi pelaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

usaha lokal untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan berinovasi dalam produksi barang yang aman dan bermutu.

Dalam konteks tersebut, Balai POM di Tanjungbalai perlu mengoptimalkan strategi pengawasan berbasis risiko dan memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi, terutama untuk mencegah peredaran produk ilegal serta memastikan kelancaran arus barang yang telah memenuhi persyaratan regulatori. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan dan mutu produk juga perlu terus digencarkan agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan standar global yang berlaku.

Globalisasi dan perdagangan bebas juga menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Tanjungbalai dalam hal adopsi teknologi informasi, percepatan layanan registrasi produk, dan transformasi digital di bidang pengawasan. Melalui penguatan sistem informasi pengawasan dan integrasi data secara nasional, Balai POM di Tanjungbalai dapat berperan aktif dalam mendukung ketertelusuran produk, pengendalian risiko, serta transparansi informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi Balai POM di Tanjungbalai untuk memperkuat peran strategisnya sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan. Melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, Balai POM di Tanjungbalai diharapkan mampu menjaga keamanan dan mutu produk di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

4. **Jumlah sarana yang semakin bertambah sedangkan jumlah petugas terbatas**

   Pertumbuhan jumlah sarana di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya pada sektor pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan usaha mikro kecil menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(UMKM). Peningkatan ini menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha dan sarana produksi yang beroperasi, kebutuhan terhadap intensitas pengawasan di lapangan juga meningkat secara signifikan. Di sisi lain, jumlah petugas pengawasan yang tersedia di Balai POM di Tanjungbalai saat ini masih terbatas dan belum sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Kondisi ini menyebabkan rasio antara jumlah pengawas dengan jumlah sarana dan produk yang diawasi menjadi tidak ideal. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan pengawasan, inspeksi, serta tindak lanjut hasil temuan berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang optimal. Keterbatasan ini juga berdampak pada pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha, yang merupakan bagian penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi keamanan, mutu, dan manfaat produk.

Selain itu, meningkatnya kompleksitas industri — baik dari sisi jenis produk, inovasi teknologi, maupun skala produksi — menuntut pengawas untuk memiliki kompetensi teknis yang semakin tinggi. Dalam situasi di mana jumlah pegawai belum memadai, sebagian besar petugas harus melaksanakan beberapa fungsi sekaligus, seperti inspeksi, sampling, pelaporan, dan edukasi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan beban kerja individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pengawasan secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Balai POM di Tanjungbalai berupaya melakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada, memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta mengusulkan penambahan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) baru di bidang pengawasan dan laboratorium. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui pelatihan teknis, bimbingan, dan pengembangan kompetensi juga menjadi fokus utama agar kualitas pengawasan tetap terjaga di tengah keterbatasan jumlah personel.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan bertambahnya jumlah industri dan semakin luasnya cakupan pengawasan, penguatan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat krusial bagi Balai POM di Tanjungbalai. Ketersediaan tenaga pengawas yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi akan menentukan efektivitas pengawasan dan perlindungan masyarakat terhadap produk yang beredar. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kapasitas pengawasan harus terus dijaga agar pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan.

5. **Persepsi pelaku usaha yang masih menganggap sulitnya pendaftaran izin edar BPOM. Disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha.**
   Pola pikir sebagian masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang masih menganggap proses pendaftaran produk ke BPOM sulit dan memerlukan waktu yang lama, menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Persepsi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha cenderung memilih jalur tidak resmi dengan menggunakan jasa perantara atau *calo registrasi* dalam mengurus perizinan produk mereka. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan potensi penyimpangan administratif dan biaya tambahan bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat berisiko terhadap keabsahan dan keakuratan data yang disampaikan dalam proses registrasi produk.

   Kesalahpahaman ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur resmi registrasi produk di BPOM serta keterbatasan literasi digital dalam mengakses sistem pendaftaran daring (*online registration system*). Di sisi lain, perubahan kebijakan dan digitalisasi proses administrasi yang dilakukan BPOM belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh seluruh pelaku usaha, terutama mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses informasi. Akibatnya, muncul persepsi bahwa proses perizinan produk memerlukan biaya dan waktu yang sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Tanjungbalai menyadari bahwa permasalahan ini memerlukan pendekatan yang edukatif dan persuasif. Upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta layanan konsultasi yang mudah diakses. Melalui kegiatan *regulatory assistance*, Balai POM berupaya menjelaskan bahwa proses pendaftaran produk di BPOM bersifat transparan, berbasis sistem daring, dan dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu melalui perantara. Selain itu, layanan konsultasi dan pendampingan registrasi produk yang diberikan oleh Balai POM di Tanjungbalai dilakukan secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik untuk mendukung peningkatan daya saing industri lokal, khususnya sektor UMKM.

Ke depan, Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk memperluas akses informasi dan memperkuat literasi regulatori masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelatihan teknis bagi pelaku usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih positif dan memahami bahwa proses registrasi di BPOM tidak hanya mudah dan transparan, tetapi juga bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen dari risiko produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan praktik penggunaan *calo registrasi* dapat diminimalkan, dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam penerapan sistem perizinan yang resmi, efisien, dan akuntabel. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap BPOM serta mendukung terwujudnya sistem pengawasan obat dan makanan yang bersih, transparan, dan berintegritas di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai.

Tabel 1. 4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Isu Strenght (Kekuatan)	Isu Weaknesses (Kelemahan)
1. Pelayanan Publik yang sangat baik 2. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabe 3. Memiliki sinergitas yang kuat dengan lintas sektor terkait	1. Jumlah penyidik pegawai negri sipil/PPNS yang terbatas 2. Sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan setiap fungsi secara optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. 4. Komitmen pemanfaatan teknologi dan inovasi 5. Kualitas SDM yang kompeten dan profesional dengan spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi. 6. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat.	3. Keberadaan Balai POM di Tanjungbalai belum banyak diketahui oleh masyarakat. 4. jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja Balai POM di Tanjungbalai
Isu Opportunities (Peluang)	**Isu Threaths (Tantangan)**
1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dan pelaku usaha 2. Peraturan yang semain menguatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait informasi sediaan farmasi dan pangan olahan 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha dibidang obat dan makanan 5. Peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan fungsi.	1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki hasil temuan pengawasan 2. Belum adanya efek jera pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang 3. Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai yang rawan terhadap jalur masuk tidak resmi sediaan farmasi dan pangan olahan. 4. Jumlah sarana bertambah sedangkan jumlah petugas terbatas. 5. Persepsi pelaku usaha yang masih menganggap sulitnya pendaftaran izin edar BPOM disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Balai POM di Tanjungbalai sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Administrasi Umum dituntut untuk melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyuluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitas percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dekungan ini, Pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentunya struktur ekonomi nasional yang lebih kokh, produktif, dan kompetitif di pasar global.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.**

Sebagai lembaga emerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good *governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Tanjungbalai sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.



2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggungjawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai POM di Tanjungbalai sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memiih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Aman dan Bermutu	Aman dan Bermutu					
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif,	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Efektif dan Efisien serta layanan Publk yang Prima						

2.4 Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Tanjungbalai ,) telah merumuskan sejumlah sasaran Kegiatan untuk periode 2025-2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut Sasaran Kegiatan Balai POM di Tanjungbalai :

1. **Sasaran kegiatan pertama Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Tanjungbalai dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya. Dalam mencapai tujuan tersebut maka untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut, maka indikatornya adalah :
    a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
    c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
    e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
    g. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium
o. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman
p. Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. **Sasaran kegiatan ke-dua Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi :** Pangan fortifikasi merupakan produk pangan yang diperkaya dengan zat gizi tertentu melalui proses penambahan nutrien guna meningkatkan mutu gizi serta memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat. UPT BPOM memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap fasilitas produksi pangan fortifikasi di wilayah pengawasannya memenuhi standar serta ketentuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan menjadi aktor penting dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk menilai keberhasilan kegiatan tersebut, digunakan indikator berupa persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan.
3. **Sasaran kegiatan ke-tiga meningkatnya efektivitas KIE :** Risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan menuntut BPOM untuk memperkuat pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Dalam hal ini, UPT BPOM diharapkan berperan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

proaktif dalam menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, serta relevan, sehingga masyarakat semakin memiliki kesadaran dan kecermatan dalam memilih serta mengonsumsi produk yang aman dan bermutu. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang terintegrasi dengan program pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di lingkungan sekolah, desa, maupun pasar sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Capaian kegiatan ini diukur melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. **Sasaran kegiatan ke-empat Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu :** Pelaku UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, maupun pangan olahan kerap menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, serta persyaratan perizinan. Dalam konteks tersebut, UPT BPOM memegang peranan penting dalam memberikan bimbingan dan pendampingan agar UMKM di wilayah pengawasannya mampu memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghasilkan produk yang layak serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kegiatan pendampingan ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar. Capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai melalui indikator berupa persentase UMKM yang mendapatkan pendampingan serta menerima rekomendasi sertifikat cara pembuatan obat bahan alam, kosmetik yang baik, dan/atau Izin Produksi CPPOB pangan olahan.
5. **Sasaran kegiatan ke-lima Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektivitas di wilayah kerja UPT:** Penyalahgunaan obat serta peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang ilegal maupun palsu merupakan ancaman signifikan terhadap kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan langkah penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, UPT BPOM menjalankan peran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

strategis dengan melaksanakan penindakan secara efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran di wilayah tugasnya. Kegiatan penindakan yang dilakukan secara terkoordinasi, sesuai ketentuan prosedural, dan berlandaskan regulasi merupakan elemen penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan. Capaian dari pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui indikator persentase keberhasilan penyidikan terhadap tindak kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT.

6. **Sasaran kegiatan ke-enam Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT :** Semakin beragamnya bentuk pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap potensi tindak kejahatan. Dalam konteks tersebut, UPT BPOM berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan secara optimal di wilayah pengawasannya melalui upaya pencegahan, penanggulangan, serta pelaksanaan patroli siber terhadap berbagai indikasi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
7. **Sasaran kegiatan ke-tujuh Layanan Publik UPT yang prima :** Pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pelayanan yang menekankan kemudahan akses, kepastian prosedur, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berupaya mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pengembangan berbagai inovasi layanan. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tersebut maka indikatornya adalah indeks pelayanan publik UPT.

8. **Sasaran kegiatan ke-delapan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal :** Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian hasil. Penerapan tata kelola yang baik tercermin melalui pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara konsisten, pembangunan zona integritas sebagai wujud komitmen antikorupsi, pemanfaatan anggaran yang efisien, serta integrasi manajemen risiko dalam seluruh proses operasional. Seluruh komponen tersebut diperkuat melalui implementasi rencana aksi reformasi birokrasi yang terstruktur dan berkesinambungan guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembentukan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut maka indikatornya adalah :
   a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
   b. Nilai AKIP UPT BPOM
   c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
   d. Indeks Manajemen Risiko UPT POM

Visi :

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama indonesia maju menuju indonesia Emas 2045"

Misi	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah,	Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu Indikator : Persentase sediaan farmasi dan pangan	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Indikator : 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	Meningkatkanyaefektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan wilayah kerja UPT Indikator : 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindakalnjut sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaku usaha, dan masyarakat	olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasam sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	2. Persentase fasilitas pelayanan telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 7. Persentase sarana sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distibusi pangan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			14. Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium. 15. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Buat sasaran kegiatan fortifikasi
	Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Indikator : Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Indikator : Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator : Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator : Persentase Laporan Analisis Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaika sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industry dalam	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	industry sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator : Indeks penguatan daya saing dan kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan oalahan	pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan Indikator : Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Indikator : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
Meningkatkan kapasitas Masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan Bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu Indikator : Indeks kesadaran Masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu		Meningkatnya efektivitas KIE Indikator : 1. Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa panga naman 4. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan	Terwujudnya organisasi yang professional, Adaptif efektif dan	Terwujudnya birokrasi yang efektif, Berintegrasi, Kolaboratif dan adaptif untuk	Layanan public UPT yang prima Indikator : UPT Indeks Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan public yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	efisien serta layanan public yang prima Indikator : Indeks RB BPOM	pelayanan public yang prima Indikator : Indeks RB BPOM	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal Indikator 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujukan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko terhadap setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Melalui proses identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program dapat dikenal sejak dini. Dengan demikian, Balai POM di Tanjungbalai dapat mengambil langkah antisipatif serta menetapkan strategi mitigasi yang tepat guna mendukung pencapaian sasaran kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Identifikasi risiko ini disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, dengan tujuan memastikan pengelolaan risiko yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Tabel 2. 2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Tanjungbalai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakukan Risiko	Indikasi PJ Perlakukan
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba.	1. Pemantauan penggunaan antibiotik di masyarakat, 2. Sosialisasi Anti Microbial Resistence kepada pelaku usaha. 3. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait	Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			penggunaan antibiotik yang bijak. 4. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	
		Belum optimalnya pemenuhan standar kemampuan laboratorium meliputi; Standar ruang lingkup pengujian, standar ruang lingkup peralatan; standar ruang lingkup kompetensi labolatorium untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan pengawasan	1. Penyusunan rencana pemenuhan bertahap terhadap standar ruang lingkup dan peralatan laboratorium sesuai kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran 2. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi petugas laboratorium melalui pelatihan teknis.	Pemeriksaan
		Sarana tidak kooperatif ataupun melakukan penolakan pemeriksaan	Melakukan tindakan persuasif pada saat pemeriksaan sehingga pihak sarana bersedia untuk diperiksa	Pemeriksaan
		Target persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tidak optimal karena pelaporan tindak lanjut pemeriksaan oleh petugas tidak sesuai timeline	1. Komitmen dari masing-masing petugas untuk melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menetapkan 1 PIC Khusus sebagai petugas monitoring pemenuhan Tindak lanjut dan CAPA	Pemeriksaan
		Pihak sarana memberikan gratifikasi kepada petugas yang melaksanakan inspeksi	1.Penandatanganan Pakta Integritas 2. Mencantumkan "Petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" pada Setiap Surat Tugas	Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Meningkatnya efektifitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Kepatuhan pelaku usaha Pangan Fortifikasi yang rendah terhadap pemenuhan aspek CPPOB.	1. Inspeksi berkala ke produsen produk pangan olahan fortifikasi 2. Pembinaan dan pendampingan teknis melalui Bimbingan Teknis CPPOB bagi pelaku usaha Sarana Produksi Pangan Fortifikasi secara berkala.	Pemeriksaan
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Pelaksanaan KIE belum sepenuhnya menjangkau wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai secara merata	1. meningkatkan kordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor 2. pembentukan kader sebagai perpanjangan tangan Balai POM di Tanjungbalai terkait penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan.	Infokom
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Kurang optimalnya pelaksanaan pendampnigan UMKM dan tingkat penyelesaian tahapan pendampingan menjadi rendah	- Menjadwalkan pendampingan luring sebanyak 1 (satu) kali pertemuan - Selebihnya adalah pertemuan/pendampingan daring	Pemeriksan
		Pelaku usaha kesulitan mendapatkan penanggungjawab sarana produksi obat tradisional dan kosmetik	- Berkoordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor lainnya yang berkaitan - Pembinaan kepada pelaku usaha terkait skema pembayaran tenaga profesi	Pemeriksaan
		Pelaku usaha tidak melanjutkan tahapan pelaksanaan program	- Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam pelaksanaan fasilitasi	Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pendampingan sehingga pendampingan UMKM sampai pada pemenuhan standar	pendampingan UMKM; - Membuat Surat Pernyataan Komitmen dan Skema Pendampingan UMKM yang berisikan timeline pendampingan yang disepakati oleh pelaku usaha - Melibatkan banyak pelaku usaha melebih target yang ditetapkan untuk kemudian dilakukan gap assesment, termasuk kemampuan pelaku usaha secara dana untuk memperbaiki sarana prasarana	
5.	Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan	Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS	Penindakan
		Orang atau sarana yang menjadi target operasi penindakan tidak berhasil ditangani (operasi penindakan gagal)	Meminta bantuan personil PPNS dari UPT lain	Penindakan
		Terjadinya pra peradilan dalam proses penyidikan yang ditangani oleh PPNS Balai POM Tanjungbalai	1. Peningkatan kompetensi PNS Balai POM di Tanjungbalai dalam pelaksanan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2. Melaksanakan Gelar Kasus dan Gelar Perkara Melakukan koordinasi dengan kejaksaan negeri	Penindakan
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau	1. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi	Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	2. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber 3. Penguatan dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan	
7.	Layanan public UPT yang prima	Adanya penerimaan gratifikasi oleh petugas saat melakukan evaluasi dokumen maupun audit sarana produksi sediaan farmasi dan Makanan	- Petugas audit menyampaikan bahwa "petugas tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" pada saat opening meeting audit PSB. - Ketua tim melakukan verifikasi dokumen hasil evaluasi petugas dengan baik	Infokom
8.	Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Belum adanya gudang untuk Penyimpanan Aset Persediaan dan Aset Rusak/ Usang	Penyimpanan Persediaan untuk sementara waktu dilakukakan di lemari Penyimpanan sampai adanya Gudang Penyimpanan	Semua Fungsi
		Penyerahan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksana melampaui 5 HK	1. Menghimbau ke semua pegawai agar cepat menyerahkan berkas pertanggungjawan keuangan; 2. Menyetor uang pajak meskipun belum menerima berkas	Semua Fungsi
		Rencana penarikan dana yang tidak sesuai dengan realisasi setiap bulan	Memastikan ke Pelaksana kegiatan setiap rencana penarikan dana yang diajukan apakah sudah sesuai dan benar-benar akan dilaksanakan pada bulan yang disusun rencananya	Semua Fungsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Terjadinya kesalahan sistem pengarsipan secara fisik maupun digital / kurang optimalnya pengarsipan secara fisik maupun digital	1. Mengusulkan adanya pelatihan terhadap petugas pengelola kearsipan 2. Petugas mengikuti pelatihan pengelolaan kearsiapan di aplikasi IDEAS	Semua Fungsi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, Informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tanjungbalai

Dalam rangka mendukung tujuan BPOM serta kebijakan transformasi sosial bidang kesehatan yang berorientasi pada terwujudnya kesehatan yang optimal bagi seluruh penduduk meliputi semua kelompok masyarakat di seleruh wilayah tanpa membedan laki-laki maupun perempuan UPT BPOM melaksanakan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan secara trintegrasi. Langkah ini juga diarahkan untuk mencapai target dan sasaran kinerja BPOM periode 2025-2029 melalui penetapan fokus dan lokus pengawasan yang sinergitas dan berkelanjutan. Balai POM di Tanjungbalai mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Olahan.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Strategi Balai POM di Tanjungbalai yang akan dilaksanakan sesuai arahan kebijakan BPOM adalah :

1. Penguatan pngawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
4. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor
7. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
8. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional.
10. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
11. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
12. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Balai POM di Tanjungbalai secara keseluruhan (continuous improvement).
13. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi UPT

ARAH KEBIJAKAN BPOM	STRATEGI BALAI POM DI TANJUNGBALAI
Penguatan pengawasan pre post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	1. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor. 2. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan. 3. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing. 2. Pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	3. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. 2. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Balai POM di



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Tanjungbalai secara keseluruhan (continuous improvement). 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tanjungbalai juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan dua program utama sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia serta Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM. Untuk mewujudkan kedua program tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berkut :

a. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh indonesia

Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berintegritas, Balai POM di Tanjungbalai secara konsisten mengimplementasikan arah kebijakan BPOM yang mencakup penguatan pengawasan pre-market dan post-market secara komprehensif berbasis risiko, termasuk penguatan regulasi, peningkatan farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan terhadap produk dan sarana yang tidak berizin. Selain itu, Balai POM di Tanjungbalai juga mendorong peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperkuat efektivitas pengawasan di bidang obat dan makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan, Balai POM di Tanjungbalai turut melaksanakan penguatan kapasitas laboratorium melalui peningkatan kualitas pengujian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem pengawasan yang modern dan responsif. Di sisi lain, Balai POM di Tanjungbalai juga berperan dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pendekatan pencegahan, deteksi dini, serta penindakan yang tegas terhadap pelanggaran baik di ranah daring maupun luring.

Selaras dengan komitmen BPOM untuk mendorong kemandirian dan daya saing industri nasional, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui peningkatan regulatory assistance, pembinaan, serta bimbingan teknis agar mampu menerapkan standar keamanan, mutu, dan manfaat produk secara konsisten. Upaya ini sejalan dengan tujuan untuk memperkuat daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, Balai POM di Tanjungbalai juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya konsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik, masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas serta berdaya dalam turut mengawasi peredaran obat dan makanan di lingkungannya. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut didukung dengan penguatan tata kelola organisasi yang profesional, agile, efektif, efisien, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian, Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM Tahun 2025–2029 menuju sistem pengawasan obat dan makanan yang unggul, terpercaya, dan berdaya saing global.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM berfokus pada pelayanan internal termasuk penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Selain itu pelayanan bagi pegawai Balai POM di Tanjungbala berupa gaji dan tunjangan serta penunjang operasional dan pemeliharaan kantor.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Tanjungbalai untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja yang akan menjadi sasaran akhir Balai POM di Tanjungbalai dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayahkerjanya. Matriks ini memuat sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai, serta indikator kinerja dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Tanjungbalai selama periode lima tahun. Oleh karena itu, diharapkan matriks ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai POM di Tanjungbalai 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektiitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	89,25	90,50	91,75	93,00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	27,00	28,00	29,00	30,00
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50,00	52,00	57,00	59,00	62,00
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	92,00	93,50	95,00	96,50
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,25	96,00	96,50	97,25	97,75
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60	93,00	94,20	95,60	97,00
	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12,00	7,00	9,00	11,00	13,00
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
	Persentase Sampel Pangan MBG yag ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase Cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64,00	73,00	73,00	82,00	82,00
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,75	87,62	88,49	89,35	90,22
	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam menyediakan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8,82	23,53	44,12	64,71	88,24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	77,00	79,00	80,00	81,00
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60
	Nilai Pembangunan ZI	0	75	75,16	75,33	75,49
Terwujudnya tata kelola pemerintah unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,30	75,80	76,30	76,80	77,30
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,72	2,75	2,78	2,80	2,83
	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00				

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indicator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Tanjungbalai periode 2025-2029 adalah seperti pada tabel :

Kerangka Pendanaan Balai POM di Tanjungbalai 2025-2029 Berdasarkan program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Periode 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	1.420,967	966,858	408,008	417,208	425,686
Kegiatan Dukung Manajemen	2.156,833	2.571,148	2.729,399	2.774,212	2.819,911
TOTAL	3.577,800	3.538,006	3.137,407	3.191,420	3.245,597

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Periode 2025-2029 Berdasarkan Sumber Pendanaan

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.577,800	3.538,006	3.137.407	3.191.420	3.245.597
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.577,800	3.538,006	3.137.407	3.191,420	3.245,597

Pelaksanaan seluruh kegiatan Balai POM di Tanjungbalai diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi BPOM secara nasional.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Renstra Balai POM di Tanjungbalai 2025-2029 disusun megacu pada Renstra BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntu BPOM untuk melakukan perubahan untuk peningkatan kinerja yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut Balai POM di Tanjungbalai telah menetapkan Rencana Strategis untuk dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.

Renstra Balai POM di Tanjungbalai 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijadikan sebagai pedoman kinerja Balai POM di Tanjungbalai .



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tanjungbalai									**3.577,800**	**3.538,006**	**3.137.407**	**3.191.420**	**3.245.597**	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**1.420.967**	**966,858**	**408.008**	**417.208**	**425.686**	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	88	89,25	90,5	91,75	93						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Tanjungbalai	0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	85	87	89	91	93						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Tanjungbalai	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	85	87	89	92	95						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Tanjungbalai	50	52	57	59	62						UPT BPOM
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	90,5	92	93,5	95	96,5						UPT BPOM
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	91	92	93	94	95						UPT BPOM
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	95,25	96	96,5	97,25	97,75						UPT BPOM
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	90	91	92	93	94						UPT BPOM
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	91,6	93	94,2	95,6	97						UPT BPOM
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Tanjungbalai	80	81	82	83	84						UPT BPOM
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Tanjungbalai	100	100	100	100	100						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Tanjungbalai	12	7	9	11	13						UPT BPOM
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Tanjungbalai	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43						
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	0	81	82	83	84						UPT BPOM
RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai POM di Tanjungbalai	0	25	35	45	55						UPT BPOM
RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tanjungbalai	158	158	158	158	158						UPT BPOM
RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai POM di Tanjungbalai	350	355	373	393	416						UPT BPOM
RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tanjungbalai	28	29	32	34	37						UPT BPOM
RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tanjungbalai	113	124	135	146	157						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Balai POM di Tanjungbalai	84	144	144	144	144						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Balai POM di Tanjungbalai	0	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Tanjungbalai	0	1	1	1	1						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	Balai POM di Tanjungbalai	0	467	467	467	467						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Balai POM di Tanjungbalai	64	73	73	82	82						UPT BPOM
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tanjungbalai	64	73	73	82	82						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Balai POM di Tanjungbalai	7	8	8	9	9						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE	Balai POM di Tanjungbalai											UPT BPOM
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Tanjungbalai	86,75	87,62	88,49	89,35	90,22						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Tanjungbalai	2	3	4	5	6					UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Tanjungbalai	1	1	2	3	3					UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	2	2					UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai POM di Tanjungbalai	95	250	300	350	400					UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Tanjungbalai	27	15	17	18	20					UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Balai POM di Tanjungbalai	2	3	4	5	6					UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		Balai POM di Tanjungbalai	1	1	2	3	3					UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	2	2					UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai POM di Tanjungbalai	8,82	23,53	44,12	64,71	88,24					UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Balai POM di Tanjungbalai	3	6	8	8	9						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Balai POM di Tanjungbalai											UPT BPOM
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Tanjungbalai	75	77	79	80	81						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	2	2						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												UPT BPOM
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Tanjungbalai	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Balai POM di Tanjungbalai	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima												UPT BPOM
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Tanjungbalai	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Balai POM di Tanjungbalai	12	26	28	30	30						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Balai POM di Tanjungbalai										UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Tanjungbalai	0	75	75,16	75,33	75,49					UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Tanjungbalai	75,3	75,8	76,3	76,8	77,3					UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Tanjungbalai	5	5	5	5	5					UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Tanjungbalai	2,72	2,75	2,78	2,8	2,83					UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Balai POM di Tanjungbalai	100									UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	1	1					UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	1	1					UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	1	1					UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									**2.156,833**	**2.571,148**	**2.729.399**	**2.774.212**	**2.819.911**	UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	1	1						**UPT BPOM**
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Tanjungbalai	1	1	1	1	1						**UPT BPOM**

Terdapat penurunan target dari tahun 2025 ke 2026 untuk indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Hal ini dikarenakan Balai POM di Tanjungbalai mengalami kenaikan/peningkatan status dari loka menjadi Balai di pertengahan tahun 2025, sehingga Tools yang digunakan dalam nilai Pemenuhan Lab di Tahun 2026-2029 menggunakan Tools Balai/Laboratorium Tingkat 2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).